

TAJUK RENCANA

Mengevaluasi Kebijakan Elpiji 3 Kg

LANGKAH Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengoreksi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang kebijakan terhadap pengecer elpiji 3 kg mendapat apresiasi banyak pihak. Awalnya Menteri ESDM melarang pengecer untuk menjual langsung elpiji 3 kg kepada masyarakat. Masyarakat diminta membeli langsung ke pangkalan, bukan pengecer. Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Februari 2025.

Kebijakan yang bersifat mendadak tanpa sosialisasi ini sontak bikin gaduh dan memicu keresahan luar biasa. Di mana-mana terjadi antrean panjang warga yang hendak membeli elpiji bersubsidi ini. Bahkan, di Tangerang Selatan, antrean panjang sampai memakan korban jiwa. Atas fenomena tersebut, Presiden Prabowo langsung memanggil Bahlil untuk dimintai penjelasan. Berikutnya Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali para pengecer untuk berjualan elpiji.

Di poin ini, kita mengapresiasi langkah cepat Prabowo mengoreksi kebijakan menteri yang tidak berpihak pada rakyat. Menghilangkan peran pengecer, seperti dilakukan Bahlil, adalah tindakan gegabah. Bahlil tidak memikirkan dampak kebijakan yang ia keluarkan. Pun ia tak pernah melihat realitas di lapangan, melainkan hanya menerima laporan sepihak dari bawahan. Akibatnya, kebijakan yang ia keluarkan tidak pro-rakyat. Ini sangat bertolak belakang dari komitmen Presiden Prabowo yang ingin menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Kita setuju agar Presiden Prabowo mengevaluasi menteri yang tidak berempati pada rakyat, apalagi tidak berpihak kepada rakyat. Itu baru masalah elpiji 3 kg, yang selama ini memang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Kita menilai kebi-

jakan Bahlil sangat menyederhanakan masalah. Ia ingin harga elpiji di masyarakat stabil, yang menurutnya ada yang mencapai Rp 26 ribu pertabung atau jauh di atas harga eceran tertinggi Rp 18 ribu. Namun caranya bukan langsung menghapus eceran. Apalagi, ia hanya menyebut sample, masih banyak harga di tingkat eceran yang wajar.

Menyadari kesalahannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun meminta maaf kepada masyarakat, termasuk kepada keluarga korban tewas akibat antrian elpiji di Tangerang Selatan. Kini kebijakan baru pemerintah, pengecer tetap diperbolehkan berjualan, namun harus mendaftarkan diri melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) agar terdaftar sebagai sub-pangkalan resmi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen serta memastikan distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran (KR 5/2).

Kita berharap kebijakan ini tidak hanya sekedar meredakan kegaduhan di masyarakat, namun benar-benar efektif menjaga stabilitas harga dan subsidi diberikan tepat sasaran.

Diharapkan kebijakan ini juga tidak berkesan ribet bagi para pengecer, karena urusan administratif. Kita khawatir prosedur yang ribet justru akan memunculkan masalah baru, misalnya penyimpanan dan sebagainya.

Kita perlu mengingatkan pemerintah terkait sasaran pemberian subsidi elpiji 3 kg, yakni kepada rumah tangga miskin, UMKM kecil seperti pedagang kakilima, usaha makanan dan industri kecil lainnya, juga petani dan nelayan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Distribusi kepada mereka inilah yang perlu ditertibkan. Sebab, dalam realitas di lapangan sering kita lihat mereka yang tidak termasuk dalam kategori di atas bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg. □ - d

Dari Mercusuar Pengetahuan ke Bisnis Tambang

WACANA pemberian hak pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan akademisi. Meski tujuannya untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap perekonomian dan memastikan keberlanjutan sektor pendidikan melalui sumber daya finansial yang baru, pengelolaan tambang oleh lembaga pendidikan tinggi menyimpan berbagai tantangan serius.

Salah satu kekhawatiran mendasar adalah tergerusnya fungsi kritis perguruan tinggi sebagai pilar independen dalam tata kelola kebijakan negara. Selama ini, perguruan tinggi memegang mandat mulia di antaranya menghasilkan ilmu pengetahuan, merangsang pemikiran kritis, dan menjadi mitra strategis masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan publik. Namun, keterlibatan dalam bisnis tambang dapat membawa institusi pendidikan tinggi ini ke dalam pusaran konflik kepentingan yang berbahaya.

Pendapatan besar dari sektor tambang berpotensi menempatkan perguruan tinggi pada posisi rentan terhadap ketergantungan finansial pada industri tertentu. Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan Slaughter dan Leslie dalam *Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University* (1997). Keduanya menjelaskan bahwa semakin besar perguruan tinggi terlibat dalam aktivitas ekonomi dan komersialisasi, kian rentan terhadap tekanan dari kepentingan eksternal, termasuk industri. Ketergantungan finansial semacam ini dapat menumpulkan daya kritis perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam, karena tekanan ekonomi sering menjadi prioritas dibandingkan independensi akademik.

Perguruan tinggi berisiko terperangkap dalam dominasi keuntungan ekonomi dan logika profit-instrumentalis. Fokus yang berlebihan pada pencapaian keuntungan dapat membuat lembaga pendidikan ini kehilangan peran vital mereka dalam mengangkat isu-isu sosial, etika, dan keadilan, yang seharusnya menjadi inti dari visi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan kapasitas perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan yang mendorong pembaruan sosial dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jika fungsi kritis ini tereduksi, perguruan tinggi tak lagi menjadi ruang bebas yang berdiri di atas prinsip keadilan dan kebenaran ilmiah. Sebaliknya, ia berisiko menjelma menjadi entitas yang jinak,

Martin Dennise Silaban

tunduk pada kepentingan ekonomi yang semestinya ia kritik. Dalam skenario semacam ini, yang terancam bukan hanya independensi akademik, tetapi juga kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi sebagai penjaga moral dan intelektual bangsa.

Tak kalah pentingnya adalah risiko lingkungan yang mungkin muncul sebagai akibat dari pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Praktik pertambangan yang sering merusak ekosistem, menyebabkan pencemaran, dan merusak sumber daya alam, bisa sangat bertentangan dengan komitmen perguruan tinggi ter-



KR-JOKO SANTOSO

hadap keberlanjutan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Meskipun terdapat potensi penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertambangan, seringkali praktik bisnis pertambangan lebih mengutamakan keuntungan finansial ketimbang menjaga kepedulian terhadap lingkungan. Perguruan tinggi yang memiliki reputasi dalam penelitian dan kebijakan lingkungan mungkin akan kehilangan kredibilitasnya jika mereka terlibat dalam praktik pertambangan yang merusak ekosistem.

Mempertahankan Kebebasan Akademik

Mengelola bisnis tambang memang menawarkan potensi keuntungan finansial yang menggiurkan bagi perguruan tinggi. Namun, keuntungan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Di balik angka-angka pendapatan yang memikat, terdapat tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan. Perguruan tinggi harus merenungkan secara mendalam dampaknya terhadap independensi akademik, potensi konflik kepentingan yang menggerogoti integritas, serta ancaman kerusakan lingkungan yang bisa men-

coreng misi luhur pendidikan.

Perguruan tinggi bukanlah sekadar institusi ekonomi, melainkan benteng terakhir yang menjaga nilai-nilai intelektual, etika, dan keberlanjutan. Menyerahkan diri pada godaan tambang tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya sama saja dengan mengabaikan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar berdirinya.

Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga kebebasan akademik dan memperjuangkan keadilan sosial, perguruan tinggi harus menjaga jarak dari godaan kepentingan ekonomi yang dapat mengoyahkan misi luhur mereka. Perguruan tinggi tidak semata-mata berperan sebagai pendukung perekonomian negara, tetapi juga harus tetap mempertahankan peran sentralnya sebagai wadah kebebasan berpikir serta motor penggerak dalam melahirkan inovasi-inovasi ilmiah.

Di tengah krisis iklim yang kian mengkhawatirkan dan kompleksitas persoalan sosial yang terus berkembang, perguruan tinggi harus berdiri teguh sebagai penjaga nilai-nilai ilmiah, penggerak perubahan sosial, serta pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai institusi yang memegang tanggung jawab untuk menuntun arah perkembangan peradaban, perguruan tinggi dituntut menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas.

Layaknya cahaya di puncak menara, perguruan tinggi harus tetap memancarkan sinar terang yang menuntun bangsa menuju kemajuan. Jangan sampai kilau emas tambang meredupkan cahayanya, membiarkan bangsa terjebak dalam gelapnya pragmatisme. Perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai instrumen ekonomi. (*)-d

**Martin Dennise Silaban, Peneliti di SHEEP Indonesia Institute & Mahasiswa Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriza Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk23@yahoo.com, iklankrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Potret Muram Pram di Buku Pelajaran

St Kartono

Pengalamannya selama dua puluh sembilan bulan ditawan Belanda di Bukit Duri memantangkan dan menyuburkan jiwanya. Di penjara itu dia memperoleh bahan mengenai penderitaan, pemikiran, dan pengkhayalan yang tidak habisnya, juga selama Pram sebagai letnan *front-correspondent* pada resimen 6 Divisi Siliwangi.

Wajah Muram

Potret Pram yang heroik revolusioner seolah menjadi muram ketika cetakan kedua buku *Peristiwa Sastra Indonesia* terbit pada Juni 1966. Wajah lain ditabalkan kepada Pram sebagai pengarang yang terlibat G30S. Dalam Bab XII ditambahkan sebagai bagian akhir yang memuat kutipan lampiran dari Surat Keputusan Pangdam VII/Peperda Jateng/DI Yogyakarta, Nomor: KEP-PPD/0051/3/1966 mengenai karya pengarang yang dituduh G30S, yang dilarang pemakaiannya/harus dibekukan. Artinya, bagi murid-murid SMA, juga siapapun, Pram boleh dipelajari, sekadar menjadi pengetahuan hafalan, tetapi karya-karyanya tidak boleh disentuh, apalagi dibaca.

Apalah artinya karya sastra yang dijauhkan dari pembacanya? Penulis pun baru merasakan kegandrungan membaca karya Pram tat kala sebagai calon guru menemukan perkuliahan seminar kritik sastra. Saya beruntung berjumpa dosen yang memaksa saya membahas novel-novel Pram dalam seminar, yakni *Mirah Si Manis Bergigi Emas, Sekali Peristiwa di Banten Selatan*, dan *Gadis Pantai*. Ketika 1988 buku-buku Pram masih dilarang dibaca dan hanya terselip

KELAHIRAN Pramoedyana Ananta Toer (6 Februari 1925-30 April 2006) akan diperingati berbagai kalangan saat genap 100 tahun pada tahun 2025 ini. Ingatan paling dekat mengenai Pram menyeruak muncul saat novelnya *Bumi Manusia* pada 2019 dilayarlebarkan sebagai film yang bertajuk sama dengan novel oleh sutradara Hanung Bramantyo. Novel itu dituliskannya dalam kurun 1969-1979 saat Pram dibuang di Pulau Buru. Alih wahan dari novel ke film tidak serta-merta memicu nama Pram mencuat lagi dengan karya-karyanya. Namun, hal itu cukup menjadi penanda bahwa sang sastrawan itu dengan seluruh karyanya tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi penguasa negeri ini.

Sebagai guru yang mengajarkan keba-hasaan dan kesastraan, penulis memanfaatkan buku *Peristiwa Sastra Indonesia* (Soetarno, 1965) untuk menyibak catatan tentang Pram. Buku pelajaran untuk sekolah menengah atas itu menyajikan potret Pram dengan wajah ganda. Satu sisi potret Pram yang diakui sebagai sastrawan mendunia, sedang yang lain adalah satu wajah muram dalam sangkar penuh rantai.

Potret Revolusioner

Pram dalam periodisasi sastra Indonesia digolongkan sebagai sastrawan Angkatan 45. Dalam buku *Peristiwa Sastra Indonesia*, A.Teeuw menyebut Pram di Angkatan 45 sebagai pengarang prosa yang terpenting dalam kesusasteraan Indonesia. Hampir semua karangan Pram yang berupa novel, roman, atau cerpen diwarnai oleh keadaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perang (misalnya tawanan, gerilya, pengkhianatan, pembunuhan, dsb.).

Karya-karya Pram dinilai terpusat pada tidak adanya perikemanusiaan di dalam perang. Manusia kehilangan sifat kemanusiaan dan tergila-gila membunuh sesamanya. Pram sebagai penulis revolusi yang terbaik pada masa itu. Artinya, lewat dialah pembaca memperoleh gambaran jelas dan lengkap mengenai revolusi.

di pojok perpustakaan kampus tidak boleh dipinjam, untunghlah dosen kami pasang badan, "Ini kajian ilmiah, saya yang tanggung jawab".

Akibat pelajaran-pelajaran itu, bisa dipastikan karya-karya Pram tidak akan menjadi bahan pembahasan apresiasi sastra di sekolah-sekolah di negaranya sendiri, padahal siswa-siswa manca negara justru menjadikan karya Pram sebagai kajian utama. Ketika 1999 singgah dua bulan di Ignatius College, Adelaide, Australia, penulis menjumpai satu bahan apresiasi sastra untuk murid yakni *Girl From The Coast* yang tak lain novel Pram *Gadis Pantai* dalam versi Inggris.

Kini karya Pram tidak lagi menjadi ancaman bagi penguasa, tetapi pengajaran sastra juga tak kunjung menemukan bentuk, bahkan para guru bahasa dan sastra zaman ini rasanya sudah tak kenal Pram dengan segala karyanya yang dahsyat. Novel-novel atau roman karya Pram kini mudah didapatkan, para guru pun tak perlu sembunyi-sembunyi membacanya, apalagi membawanya ke kelas. ***-d

**St Kartono, Guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta.*

Pojok KR

Presidan Prabowo minta aktifkan kembali pengecer elpiji.

- Evaluasi kinerja Menteri ESDM.

Budiman Sudjatmiko: DIY harus bisa bangun industri teknologi.

- Gudangnya intelektual, tinggal dananya.

Kasus pagar laut naik ke tahap penyidikan.

- Menunggu siapa tersangka.

Berabe